



Vol. 1 | No. 1 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Pengembangan Program Pendidikan Nonformal dalam Perspektif Kurikulum Merdeka

Merdeka Development of Non-Formal Education Programs in the Perspective of the Independent Curriculum

Nama Penulis

Prasetyo Wandika¹
Nina Rahmawati²

Afiliasi Penulis

Universitas Pendidikan Indonesia,
Bandung^{1,2}

Email Koresponden Utama: prasetyowandika@upi.edu

Abstrak

Pendidikan nonformal memegang peranan yang sangat strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh sistem pendidikan formal. Dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka yang mengedepankan fleksibilitas, otonomi, dan relevansi kontekstual, pendidikan nonformal memiliki potensi yang luar biasa untuk bertransformasi menjadi sistem pembelajaran yang lebih responsif, inovatif, dan berdampak tinggi bagi masyarakat luas. Artikel ini mengkaji secara komprehensif pengembangan program pendidikan nonformal dalam perspektif Kurikulum Merdeka, mencakup tiga dimensi utama: pertama, landasan konseptual dan kebijakan pengembangan pendidikan nonformal dalam kerangka Kurikulum Merdeka; kedua, model dan strategi pengembangan program pendidikan nonformal yang responsif terhadap prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka; dan ketiga, tantangan, peluang, serta implikasi implementasinya di lapangan. Kajian ini menegaskan bahwa filosofi Kurikulum Merdeka yang berpusat pada peserta didik, menghargai keberagaman, dan berorientasi pada kompetensi esensial secara natural selaras dengan karakter pendidikan nonformal yang fleksibel, kontekstual, dan berbasis kebutuhan komunitas, sehingga keduanya dapat bersinergi secara optimal dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat yang bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Artikel ini telah dipresentasikan pada [Seminar Nasional Pendidikan Berbasis Riset dan Inovasi dengan tema "Rekonstruksi Pendidikan Abad 21: Integrasi Teknologi, Humanisme, dan Kearifan Lokal"](#) diselenggarakan oleh Lembaga Pemerhati Pendidikan Masyarakat Indonesia (LPPMI) bekerja sama dengan Universitas Islam As'adiyah Sengkang, pada 16 Mei 2026.

Kata Kunci: pendidikan nonformal; Kurikulum Merdeka; pengembangan program; pendidikan sepanjang hayat

Abstract

Non-formal education plays a highly strategic role in expanding access to education for communities that have not been optimally served by the formal education system. In the context of the implementation of the Merdeka Curriculum, which prioritizes flexibility, autonomy, and contextual relevance, non-formal education holds immense potential to transform into a more responsive, innovative, and high-impact learning system for the broader community. This article comprehensively examines the development of non-formal education programs from the perspective of the Merdeka Curriculum, covering three main dimensions: first, the conceptual and policy foundations of non-formal education development within the Merdeka Curriculum framework; second, models and strategies for developing non-formal education programs that are responsive to the principles of the Merdeka Curriculum; and third, the challenges, opportunities, and implications of its implementation in the field. The study affirms that the student-centered, diversity-respecting, and essential-competency-oriented philosophy of the Merdeka Curriculum is naturally aligned with the flexible, contextual, and community-needs-based character of non-formal education, so that both can optimally synergize in realizing meaningful lifelong learning for all segments of society.

Keywords: non-formal education; Merdeka Curriculum; program development; lifelong learning

Pendahuluan

Sistem pendidikan Indonesia yang komprehensif dan berkeadilan tidak dapat sepenuhnya diwujudkan hanya melalui jalur pendidikan formal yang bersifat terstruktur, berjenjang, dan berstandar seragam (Muhsyanur and Mustapha, 2023). Kenyataan sosial menunjukkan bahwa masih terdapat jutaan warga negara Indonesia yang karena berbagai faktor, mulai dari kemiskinan, keterpencilan geografis, keterbatasan fisik, tanggung jawab keluarga, hingga kebutuhan pembelajaran spesifik yang tidak terakomodasi oleh kurikulum formal, tidak dapat atau tidak sepenuhnya terlayani oleh sistem pendidikan formal (Muhsyanur et al., 2021, 2022). Di sinilah pendidikan nonformal mengambil peran yang tidak tergantikan sebagai jalur alternatif sekaligus komplementer yang menjangkau mereka yang terabaikan dan memberikan kesempatan belajar yang relevan, fleksibel, dan bermakna bagi kelompok-kelompok yang paling

membutuhkan (Coombs & Ahmed, 1974, dalam Rogers, 2014). Dengan demikian, pengembangan program pendidikan nonformal yang berkualitas dan responsif merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan sistem pendidikan nasional yang benar-benar inklusif dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengakui pendidikan nonformal sebagai jalur pendidikan yang setara dan saling melengkapi dengan pendidikan formal dan informal. Pasal 26 undang-undang tersebut menetapkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam kerangka ini, satuan-satuan pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), kelompok belajar, majelis taklim, dan berbagai bentuk lembaga pendidikan masyarakat lainnya memiliki mandat yang jelas dan strategis dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh (Kemendiknas, 2010).

Kehadiran Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek sejak tahun 2022 membawa angin segar bagi pengembangan pendidikan nonformal di Indonesia. Filosofi inti Kurikulum Merdeka yang menekankan kemerdekaan belajar, fleksibilitas kurikulum, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan relevansi kontekstual sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang selama ini telah menjadi DNA dari pendidikan nonformal yang efektif (Kemendikbudristek, 2022). Ki Hadjar Dewantara, yang pemikirannya menjadi rujukan utama Kurikulum Merdeka, justru merintis pendidikan yang berpusat pada kebutuhan dan potensi peserta didik dalam konteks sosial-kultural yang konkret, sebuah prinsip yang sangat dekat dengan semangat pendidikan nonformal kontemporer (Dewantara, 1977). Keselarasan filosofis ini menciptakan peluang sinergi yang sangat besar antara Kurikulum Merdeka dan pendidikan nonformal dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada relevansi.

Konsep pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) yang semakin mendapat pengakuan global sebagai kerangka utama kebijakan pendidikan abad ke-21 memberikan legitimasi teoretis yang sangat kuat bagi pengembangan pendidikan nonformal. UNESCO (2015) dalam dokumen Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action menegaskan bahwa pendidikan sepanjang hayat harus menjadi prinsip pengorganisasi bagi seluruh sistem pendidikan, dan pendidikan nonformal merupakan komponen yang tidak tergantikan dalam sistem pembelajaran sepanjang hayat yang komprehensif. Jarvis (2010) menambahkan bahwa dalam masyarakat yang berubah dengan cepat akibat globalisasi dan kemajuan teknologi, kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbarui kompetensi sepanjang kehidupan menjadi kompetensi yang paling esensial, dan pendidikan nonformal merupakan wahana yang paling fleksibel dan responsif untuk mengembangkan kompetensi tersebut.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa program pendidikan nonformal yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan secara konsisten memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan peserta didiknya. Studi yang dilakukan oleh Comings, Reder, dan Sum (2001) menemukan bahwa partisipasi dalam program pendidikan nonformal berkualitas tinggi secara konsisten meningkatkan kemampuan literasi fungsional, keterampilan kerja, pendapatan, dan partisipasi sosial peserta didiknya. Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Sudjana (2010) menunjukkan bahwa program PKBM yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis kebutuhan komunitas dengan pengembangan keterampilan hidup menghasilkan peningkatan kualitas hidup yang terukur dan berkelanjutan bagi peserta didiknya. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa pengembangan program pendidikan nonformal yang berkualitas dalam perspektif Kurikulum Merdeka bukan hanya relevan secara kebijakan, tetapi juga terbukti berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif pengembangan program pendidikan nonformal dalam perspektif Kurikulum Merdeka. Pembahasan

diorganisasikan dalam tiga sub-bagian: pertama, landasan konseptual dan kebijakan yang mendasari sinergi antara pendidikan nonformal dan Kurikulum Merdeka; kedua, model dan strategi pengembangan program pendidikan nonformal yang responsif terhadap prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka; dan ketiga, tantangan, peluang, dan implikasi implementasinya bagi penguatan sistem pendidikan nonformal di Indonesia. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis yang bermakna bagi para pengelola lembaga pendidikan nonformal, pendidik, perancang kebijakan, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nonformal di Indonesia.

Pembahasan

1. Landasan Konseptual dan Kebijakan Sinergi Pendidikan Nonformal dengan Kurikulum Merdeka

Pendidikan nonformal sebagai konsep dan praktik telah mengalami perkembangan konseptual yang sangat signifikan sejak Philip Coombs pertama kali memperkenalkan kategorisasi formal, nonformal, dan informal dalam pendidikan pada awal tahun 1970-an. Rogers (2014) mendefinisikan pendidikan nonformal sebagai kegiatan pendidikan yang terorganisasi dan sistematis namun dilaksanakan di luar kerangka sistem persekolahan yang sudah mapan, bersifat fleksibel dalam hal waktu, tempat, metode, dan konten, serta secara eksplisit dirancang untuk melayani kebutuhan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kebutuhan belajar spesifik yang tidak terakomodasi oleh pendidikan formal. Karakteristik-karakteristik ini, yaitu fleksibilitas, kontekstualisasi, orientasi pada kebutuhan nyata, dan aksesibilitas, secara langsung selaras dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menolak uniformitas dan menekankan relevansi serta otonomi dalam perancangan pengalaman belajar.

Landasan filosofis Ki Hadjar Dewantara yang menjadi inspirasi utama Kurikulum Merdeka sesungguhnya mengandung elemen-elemen yang sangat relevan bagi pengembangan pendidikan nonformal yang berkualitas. Konsep *among*, yang mengajarkan bahwa tugas pendidik adalah mengasuh, membimbing, dan mendorong pertumbuhan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat

zamannya tanpa memaksakan kehendak, merupakan prinsip pedagogis yang paling mendasar bagi pendidikan nonformal yang efektif (Dewantara, 1977). Prinsip ini menegaskan bahwa kurikulum dan pembelajaran harus mengikuti kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik, bukan sebaliknya, sebuah pandangan yang secara fundamental membedakan pendidikan yang manusiawi dari pendidikan yang mekanistik. Dalam konteks pendidikan nonformal, filosofi among ini diwujudkan melalui pendekatan pembelajaran berbasis kebutuhan (*needs-based learning*) yang selalu dimulai dari analisis mendalam tentang kebutuhan, aspirasi, dan kondisi konkret komunitas yang dilayani.

Kerangka kebijakan Kurikulum Merdeka memberikan beberapa instrumen kebijakan yang secara langsung relevan bagi pengembangan program pendidikan nonformal. Konsep Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang memberikan otonomi kepada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal merupakan instrumen yang sangat relevan bagi lembaga-lembaga pendidikan nonformal seperti PKBM dan LKP. Otonomi kurikulum ini memungkinkan lembaga pendidikan nonformal untuk merancang program-program yang benar-benar menjawab kebutuhan spesifik komunitas mereka, mengintegrasikan kearifan lokal dan sumber daya komunitas sebagai konten pembelajaran, dan mengembangkan metode serta sistem asesmen yang paling sesuai dengan karakteristik peserta didik mereka (Kemendikbudristek, 2022). Dengan demikian, KOSP dalam perspektif pendidikan nonformal bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen transformatif yang memungkinkan lembaga pendidikan nonformal untuk benar-benar menjadi lembaga pembelajaran yang responsif dan berdampak.

Konsep profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama Kurikulum Merdeka memiliki relevansi yang sangat kuat bagi pengembangan program pendidikan nonformal, karena dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif,

merupakan kompetensi-kompetensi yang justru paling efektif dikembangkan melalui pengalaman belajar berbasis komunitas yang menjadi kekuatan khas pendidikan nonformal. Penelitian yang dilakukan oleh Kamil (2011) menunjukkan bahwa program pendidikan nonformal yang dirancang secara kontekstual dan berbasis komunitas secara konsisten menghasilkan peserta didik yang lebih mandiri, lebih kolaboratif, dan memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap nilai-nilai kemasyarakatan, yang secara substansial mencerminkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan menjadikan profil pelajar Pancasila sebagai kerangka tujuan, program pendidikan nonformal memperoleh arah yang lebih jelas dan terintegrasi dengan visi pendidikan nasional yang lebih luas.

2. Model dan Strategi Pengembangan Program Pendidikan Nonformal Berbasis Prinsip Kurikulum Merdeka

Pengembangan program pendidikan nonformal yang responsif terhadap prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka memerlukan kerangka desain program yang sistematis namun tetap fleksibel dan berbasis kebutuhan. Model desain program yang paling relevan untuk konteks ini adalah model berbasis kebutuhan komunitas (community needs assessment model) yang dikembangkan oleh Caffarella dan Daffron (2013), yang menempatkan analisis mendalam tentang kebutuhan belajar komunitas sasaran sebagai titik tolak yang tidak dapat dinegosiasikan dalam seluruh proses pengembangan program. Dalam perspektif Kurikulum Merdeka, analisis kebutuhan ini harus dilakukan tidak hanya dari perspektif defisit, yaitu apa yang kurang dari komunitas, tetapi juga dari perspektif kekuatan berbasis aset (asset-based approach), yaitu apa kekuatan, sumber daya, kearifan, dan potensi yang sudah dimiliki komunitas dan dapat menjadi fondasi bagi pengembangan program yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang menjadi salah satu pendekatan unggulan dalam Kurikulum Merdeka memiliki relevansi yang sangat tinggi bagi pendidikan nonformal. Dalam konteks pendidikan nonformal, pembelajaran berbasis proyek dapat diwujudkan melalui program-program yang menugaskan peserta didik untuk mengidentifikasi dan

memecahkan masalah nyata di komunitas mereka, mengembangkan usaha ekonomi produktif, mendokumentasikan dan merevitalisasi kearifan lokal, atau merancang solusi inovatif bagi tantangan sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Thomas (2000) menemukan bahwa project-based learning yang dirancang dengan baik menghasilkan perkembangan kompetensi yang jauh lebih komprehensif dan tahan lama dibandingkan pembelajaran berbasis ceramah dan hafalan, karena dalam proses pengerjaan proyek peserta didik secara alami mengintegrasikan berbagai dimensi kompetensi, mulai dari pengetahuan, keterampilan, nilai, hingga kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi. Dalam PKBM dan LKP yang mengadopsi pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memperoleh sertifikat tetapi juga kapasitas nyata untuk bertindak secara produktif dan inovatif dalam kehidupan mereka.

Sistem asesmen dan rekognisi pembelajaran dalam program pendidikan nonformal yang dikembangkan sesuai prinsip Kurikulum Merdeka harus menggeser paradigma dari asesmen berbasis ujian menuju asesmen autentik berbasis portofolio dan demonstrasi kompetensi nyata. Dalam konteks pendidikan nonformal, asesmen autentik ini dapat berupa demonstrasi langsung keterampilan yang telah dipelajari, portofolio hasil karya peserta didik selama mengikuti program, proyek nyata yang diselesaikan, atau refleksi mendalam tentang perkembangan diri yang dialami selama proses pembelajaran. Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang telah diakui dalam sistem pendidikan nasional Indonesia merupakan instrumen yang sangat relevan dan strategis dalam konteks ini, karena memungkinkan pengalaman dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan nonformal dan jalur non-tradisional lainnya untuk diakui secara formal dalam sistem pendidikan (Ditjen PAUD dan Dikmas, 2019). Integrasi RPL dengan program-program pendidikan nonformal berbasis Kurikulum Merdeka dapat menciptakan jalur pengakuan kompetensi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran dalam program pendidikan nonformal yang berorientasi Kurikulum Merdeka membuka peluang

yang sangat besar untuk memperluas jangkauan, meningkatkan kualitas, dan mempersonalisasi pengalaman belajar peserta didik di luar sistem formal. Platform e-learning, aplikasi mobile learning, podcast edukatif, video tutorial berbahasa lokal, dan media sosial yang dimanfaatkan secara pedagogis merupakan instrumen digital yang dapat memperkaya program pendidikan nonformal secara signifikan, khususnya bagi komunitas yang berada di daerah terpencil dengan keterbatasan akses terhadap lembaga pendidikan fisik. Penelitian yang dilakukan oleh Bakia, Shear, Toyama, dan Lassetter (2012) menunjukkan bahwa blended learning, yaitu kombinasi yang terancang antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, menghasilkan capaian belajar yang secara konsisten lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka semata atau pembelajaran daring semata. Dalam konteks program pendidikan nonformal berbasis Kurikulum Merdeka, pendekatan blended learning ini memungkinkan penyelenggara untuk mempertahankan kekuatan relasional dan kontekstual dari pembelajaran tatap muka sambil memanfaatkan fleksibilitas dan kekayaan konten dari pembelajaran digital.

3. Tantangan, Peluang, dan Implikasi Implementasi Pengembangan Pendidikan Nonformal dalam Perspektif Kurikulum Merdeka

Implementasi pengembangan program pendidikan nonformal dalam perspektif Kurikulum Merdeka menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural dan sistemik. Tantangan pertama adalah kesenjangan kapasitas kelembagaan yang sangat signifikan di antara lembaga-lembaga pendidikan nonformal di seluruh Indonesia. Sebagian besar PKBM dan LKP, khususnya di daerah-daerah yang kurang berkembang, menghadapi keterbatasan yang serius dalam hal kapasitas pengelola dan pendidik, ketersediaan sumber daya, infrastruktur fisik, dan akses terhadap informasi tentang inovasi-inovasi terbaru dalam pengembangan program. Penelitian yang dilakukan oleh Triyanto (2021) menemukan bahwa lebih dari 60 persen PKBM di Indonesia masih beroperasi pada kapasitas minimal, dengan pendidik yang sebagian besar berstatus sukarela, fasilitas yang sangat terbatas, dan program yang belum terdokumentasikan

dengan baik. Kesenjangan kapasitas ini merupakan hambatan struktural yang harus diatasi terlebih dahulu sebelum implementasi program-program berbasis Kurikulum Merdeka dapat dilakukan secara bermakna dan berdampak.

Tantangan kedua yang tidak kalah krusial adalah belum memadainya sistem akreditasi, pengakuan, dan ekuivalensi yang menghubungkan capaian pendidikan nonformal dengan sistem pendidikan formal dan dunia kerja secara sistematis. Meskipun kebijakan RPL telah ada secara legal, implementasinya masih sangat terbatas dan belum merata, sehingga banyak lulusan program pendidikan nonformal yang berkualitas tetap menghadapi stigma dan diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan lanjutan dan peluang kerja yang lebih baik. Belanger dan Tuijnman (1997) dalam kajian komparatif mereka tentang pendidikan sepanjang hayat di berbagai negara menemukan bahwa integrasi yang lemah antara pendidikan nonformal dan sistem pendidikan formal merupakan hambatan terbesar bagi terwujudnya ekosistem pembelajaran sepanjang hayat yang inklusif dan berkeadilan. Mengatasi tantangan ini memerlukan reformasi kebijakan yang komprehensif yang tidak hanya memperkuat instrumen RPL tetapi juga membangun jembatan yang lebih sistematis antara capaian pendidikan nonformal dengan jenjang-jenjang pendidikan formal dan standar kompetensi dunia kerja.

Di sisi peluang, momentum kebijakan yang paling strategis saat ini adalah kerangka Merdeka Belajar yang secara (Muhsyanur, 2023, 2024a, 2024b) eksplisit mencakup dimensi pendidikan vokasi, keterampilan, dan pembelajaran berbasis komunitas yang merupakan domain utama pendidikan nonformal. Program-program seperti Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK), Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), dan berbagai program kemitraan antara PKBM dengan dunia usaha dan industri yang semakin digiatkan oleh Kemendikbudristek menciptakan ekosistem kebijakan yang semakin kondusif bagi pengembangan program pendidikan nonformal yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Lebih jauh, tren global menuju ekonomi berbasis keterampilan dan pengetahuan yang ditandai oleh meningkatnya kebutuhan akan upskilling dan reskilling secara berkelanjutan menciptakan permintaan yang semakin besar

terhadap program-program pendidikan nonformal yang fleksibel, berbasis kompetensi, dan dapat diakses oleh siapa saja kapan saja (World Economic Forum, 2023). Indonesia yang memiliki jaringan PKBM dan LKP yang luas di seluruh pelosok nusantara sesungguhnya memiliki infrastruktur yang sangat strategis untuk merespons peluang ini secara optimal.

Implikasi jangka panjang dari pengembangan program pendidikan nonformal yang berorientasi Kurikulum Merdeka bagi pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia bersifat luas dan mendalam (Muhsyanur Muhsyanur, Nurul Hidayanti Mahas, 2025). Pada tataran individual, program pendidikan nonformal yang berkualitas dan responsif memberikan kesempatan kedua bagi jutaan warga negara yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan kualitas hidup, dan berpartisipasi secara bermartabat dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Pada tataran komunitas, program pendidikan nonformal yang berakar pada kebutuhan dan potensi lokal berperan sebagai katalis pemberdayaan komunitas yang mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif kolektif, memperkuat ikatan sosial, dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan tantangan-tantangan pembangunan mereka secara mandiri dan berkelanjutan (Muhsyanur, 2025). Pada tataran nasional, penguatan sistem pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan visi Kurikulum Merdeka berkontribusi pada terwujudnya ekosistem pendidikan sepanjang hayat yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pengembangan potensi optimal setiap warga negara, yang pada akhirnya menjadi fondasi kokoh bagi Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat di abad ke-21.

Simpulan

Pengembangan program pendidikan nonformal dalam perspektif Kurikulum Merdeka merupakan agenda strategis yang memiliki landasan konseptual yang kokoh, relevansi kebijakan yang tinggi, dan potensi dampak yang sangat luas bagi pembangunan manusia Indonesia. Melalui tiga dimensi pembahasan yang saling menopang, yaitu keselarasan filosofis dan kebijakan antara pendidikan nonformal dengan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka yang berakar pada pemikiran Ki

Hadjar Dewantara; model dan strategi pengembangan program yang mengintegrasikan analisis kebutuhan berbasis aset, pembelajaran berbasis proyek, asesmen autentik, dan teknologi digital; serta peta tantangan struktural dan peluang strategis yang membingkai agenda pengembangan ke depan, artikel ini telah menunjukkan bahwa pendidikan nonformal dan Kurikulum Merdeka bukan dua entitas yang terpisah, melainkan dua komponen dari satu visi yang sama tentang pendidikan yang memerdekakan, memanusiakan, dan memberdayakan. Mewujudkan sinergi ini secara optimal memerlukan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari penguatan kapasitas kelembagaan PKBM dan LKP, reformasi sistem akreditasi dan rekognisi kompetensi, penyediaan dukungan teknis dan finansial yang memadai oleh pemerintah, hingga pembangunan kemitraan yang strategis antara lembaga pendidikan nonformal dengan dunia usaha, industri, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi, demi terwujudnya cita-cita pendidikan sepanjang hayat yang bermakna, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

- Bakia, M., Shear, L., Toyama, Y., & Lassetter, A. (2012). *Understanding the implications of online learning for educational productivity*. U.S. Department of Education, Office of Educational Technology.
- Belanger, P., & Tuijnman, A. (1997). *New patterns of adult learning: A six-country comparative study*. Pergamon Press.
- Caffarella, R. S., & Daffron, S. R. (2013). *Planning programs for adult learners: A practical guide (3rd ed.)*. Jossey-Bass.
- Comings, J., Reder, S., & Sum, A. (2001). *Building a level playing field: The need to expand and improve the national and state adult education and literacy systems*. National Center for the Study of Adult Learning and Literacy, Harvard Graduate School of Education.
- Dewantara, K. H. (1977). *Pendidikan: Bagian pertama*. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

- Ditjen PAUD dan Dikmas. (2019). *Petunjuk teknis penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada satuan pendidikan nonformal*. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemendikbud.
- Jarvis, P. (2010). *Adult education and lifelong learning: Theory and practice (4th ed.)*. Routledge.
- Kamil, M. (2011). *Pendidikan nonformal: Pengembangan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Indonesia*. Alfabeta.
- Kemendikbudristek. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kemendiknas. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Muhsyanur and Mustapha, B. (2023). Challenges and Strategies in Teaching Indonesian to Indonesian Occupied Students in Malaysia. *TRICKS: Journal Ff Education And Learning Practices*, 1(1), 32–39. <https://journal.echaprogres.or.id/index.php/tricks/article/view/6>
- Muhsyanur, M. (2023). The Effectiveness of Problem-Based Learning on Critical Thinking Skills in Indonesian Language Education. *TRICKS: Journal of Education and Learning Practices*, 1(3), 12–23. <https://journal.echaprogres.or.id/index.php/tricks/article/view/36>
- Muhsyanur, M. (2024a). Implementation of Merdeka Belajar in Indonesian Language Learning in Senior High Schools. *Jurnal Ilmiah Insan Mulia*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.59923/jiim.v1i1.170>
- Muhsyanur, M. (2024b). *Love-Based Curriculum as a New Paradigm in Language Education : Between Cognition , Affection , and Spirituality*. 2(5), 12–19.
- Muhsyanur, M. (2025). Digital Literation: Dening Network-Based Hoaks Language in The News A Covid-19 Pandemic Discourse in Indonesia. *INSPIRATION:*

- Instructional Practices in Language Education*, 4(1), 20–29.
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/inspiration/article/view/25790>
- Muhsyanur, M., Larisu, Z., Sanulita, H., Ertanti, D. W., & Widada, D. M. (2022). Indonesian netizens expressions potentially satire with the Covid-19 pandemic on social media Facebook. *Linguistics and Culture Review*, 6(1), 55–69. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6n1.1942>
- Muhsyanur Muhsyanur, Nurul Hidayanti Mahas, K. K. (2025). Integrating the Curriculum of Love in Strengthening Indonesian Language Politeness Based on Islamic Educational Values among Students at As' adiyah Islamic University Sengkang. *Global Dialogues in Humanities and Pedagogy*, 4(10), 12–23. <https://journal.grasglobal.org/index.php/gdhp/article/view/41>
- Muhsyanur, Rahmatullah, A. S., Misnawati, Dumiyati, & Ghufron, S. (2021). The Effectiveness of “Facebook” As Indonesian Language Learning Media for Elementary School Student: Distance Learning Solutions in the Era of the COVID-19 Pandemic. *Multicultural Education*, 7(04), 38–47. <https://www.mccaddogap.com/ojs/index.php/me/article/view/8%0Ahttps://www.mccaddogap.com/ojs/index.php/me/article/download/8/10>
- Rogers, A. (2014). *Non-formal education: Flexible schooling or participatory education?* Springer.
- Sudjana, D. (2010). *Pendidikan nonformal: Wawasan, sejarah perkembangan, falsafah, dan teori pendukung, serta asas*. Falah Production.
- Thomas, J. W. (2000). *A review of research on project-based learning*. The Autodesk Foundation.
- Triyanto, E. (2021). Evaluasi kinerja pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal di era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 15(2), 78–94. <https://doi.org/10.24036/jpls.v15i2.3328>
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the implementation of Sustainable Development Goal 4*. UNESCO.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Sekretariat
Negara.

World Economic Forum. (2023). *Future of jobs report 2023*. World Economic
Forum.